

KOMUNIKASI KRISIS PEMERINTAHAN PRABOWO DALAM KASUS TEROR KEPALA BABI KE REDAKSI TEMPO

Crisis Communication of the Prabowo Administration in the Pig's-Head Terror Case against the Tempo Newsroom

Faisyal; Pangi Syarwi Chaniago

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bung Karno

*Email: faisyal@ubk.ac.id; pangisyarwi.chaniago@gmail.com

Abstract: *This study analyzes the Prabowo administration's crisis communication following the delivery of a pig's head to the Tempo newsroom in March 2025. The incident was publicly understood as intimidation against a journalist and press freedom. Using a qualitative descriptive case study, the research examines news reports, public statements by government officials, statements from journalist-safety organizations, and supporting literature. Crisis-communication criteria and authoritarian press theory are used to evaluate response speed, empathy, message consistency, institutional responsibility, and trust recovery. The analysis finds that a dismissive public remark attributed to the Head of the Presidential Communication Office shifted attention from the attack to the government's tone, amplified criticism, and created inconsistency with assurances of press freedom. The response did not sufficiently foreground concern for the victim, law-enforcement follow-up, or a coordinated recovery message. The case shows how inadequate empathy and message discipline can turn an external security incident into a reputational crisis for government. However, the unknown perpetrator and the absence of evidence linking the administration to the attack mean that the study evaluates public communication only; it does not establish government involvement. A credible response requires victim-centered empathy, factual updates, consistent interagency messaging, protection of journalistic work, and transparent follow-up.*

Keywords: Crisis communication; Press freedom; Government communication; Journalist safety; Tempo

Abstrak: Penelitian ini menganalisis komunikasi krisis pemerintahan Prabowo setelah pengiriman kepala babi ke redaksi Tempo pada Maret 2025. Peristiwa tersebut dipahami publik sebagai intimidasi terhadap jurnalis dan kemerdekaan pers. Penelitian menggunakan studi kasus deskriptif kualitatif dengan menelaah pemberitaan, pernyataan publik pejabat pemerintah, pernyataan organisasi keselamatan jurnalis, dan literatur pendukung. Kriteria komunikasi krisis dan teori pers otoritarian digunakan untuk mengevaluasi kecepatan respons, empati, konsistensi pesan, tanggung jawab institusional, dan pemulihan kepercayaan. Analisis menunjukkan bahwa pernyataan publik yang meremehkan ancaman dan dikaitkan dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan mengalihkan perhatian dari serangan ke nada komunikasi pemerintah, memperbesar kritik, dan tidak konsisten dengan jaminan kebebasan pers. Respons belum cukup menonjolkan kepedulian terhadap korban, tindak lanjut penegakan hukum, atau pesan pemulihan yang terkoordinasi. Kasus ini memperlihatkan bahwa kekurangan empati dan disiplin pesan dapat mengubah insiden keamanan eksternal menjadi krisis reputasi pemerintah. Namun, pelaku yang belum diketahui dan ketiadaan bukti keterlibatan pemerintah membatasi kajian pada evaluasi komunikasi publik; artikel tidak menetapkan keterlibatan pemerintah dalam teror. Respons yang kredibel memerlukan empati berpusat pada korban, pembaruan faktual, pesan lintas lembaga yang konsisten, perlindungan kerja jurnalistik, dan tindak lanjut yang transparan.

Kata Kunci: Komunikasi krisis; Kemerdekaan pers; Komunikasi pemerintah; Keselamatan jurnalis; Tempo

1. Pendahuluan

Pada Rabu, 19 Maret 2025, sebuah paket berisi kepala babi dikirim ke redaksi Tempo dan ditujukan kepada Francisca Christy Rosana, jurnalis desk politik serta pengisi siniar Bocor Alus Politik. Paket diterima satuan pengamanan pada pukul 16.15 WIB dan dibuka pada 20 Maret 2025. Aliansi Jurnalis Independen Jakarta dan LBH Pers menyebut peristiwa tersebut sebagai intimidasi dan ancaman simbolik terhadap jurnalis serta kerja pers.

Kasus ini berkaitan dengan hak atas rasa aman, kemerdekaan pers, dan kepentingan publik memperoleh informasi. Dewan Pers kemudian mencatat serangan simbolik terhadap Tempo dalam konteks penguatan mekanisme nasional keselamatan pers. Pada saat pelaku belum diketahui, tanggung jawab komunikasi pemerintah bukan menetapkan kesimpulan sebelum penyelidikan, melainkan menunjukkan kepedulian terhadap korban, memastikan penegakan hukum, menjamin ruang kerja jurnalistik, dan menyampaikan informasi yang konsisten.

Peristiwa keamanan dapat berkembang menjadi krisis reputasi ketika respons pejabat dianggap meremehkan korban atau bertentangan dengan ekspektasi publik. Dalam kasus Tempo, komentar yang dikaitkan dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan memindahkan fokus dari tindakan teror menuju kualitas komunikasi pemerintah. Kritik muncul karena nada respons dinilai tidak sebanding dengan ancaman yang diterima jurnalis.

Penelitian ini menganalisis bagaimana pemerintahan Prabowo mengomunikasikan respons terhadap kasus tersebut dan bagaimana respons itu berkaitan dengan persepsi mengenai perlindungan kemerdekaan pers. Analisis tidak menyelidiki pelaku dan tidak menilai tanggung jawab pidana. Pertanyaan kajian dibatasi pada kecepatan, empati, konsistensi,

tanggung jawab institusional, serta upaya pemulihan kepercayaan.

2. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus dokumenter. Bahan analisis berupa pemberitaan mengenai kronologi teror, transkrip atau kutipan pernyataan pejabat, pernyataan Aliansi Jurnalis Independen dan LBH Pers, dokumen Dewan Pers, serta literatur komunikasi krisis, komunikasi pemerintah, dan teori pers. Data dibaca untuk mengidentifikasi aktor, urutan peristiwa, isi pesan, nada, tanggung jawab yang dinyatakan, dan respons publik yang terdokumentasi.

Analisis dilakukan melalui pengelompokan bukti ke dalam lima kriteria: kecepatan, empati, konsistensi, tanggung jawab, dan pemulihan kepercayaan. Teori pers otoritarian digunakan sebagai lensa kritis untuk membaca kecenderungan relasi negara-pers, bukan sebagai label otomatis bagi keseluruhan sistem pemerintahan. Naskah sumber tidak mencantumkan daftar lengkap dokumen, tanggal penelusuran, kriteria inklusi, prosedur pengodean, atau pembandingan antarpeneliti; karena itu, simpulan diposisikan sebagai interpretasi kasus, bukan pengukuran kausal atau representasi seluruh opini publik.

3. Kajian Literatur

3.1. Teori Pers Otoritarian

Siebert, Peterson, dan Schramm (1956) menempatkan teori pers otoritarian sebagai model ketika media berada di bawah kepentingan penguasa, kebebasan kritik dibatasi, dan kontrol dapat dijalankan melalui izin, sensor, atau sanksi. Kerangka tersebut berguna untuk menguji tanda-tanda pembatasan pers, tetapi penerapannya harus didasarkan pada bukti kebijakan dan praktik yang sistematis. Satu pernyataan pejabat yang buruk tidak cukup untuk membuktikan bahwa seluruh sistem pers bersifat otoritarian.

3.2. Komunikasi Krisis

Komunikasi krisis mencakup pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi sebelum, selama, dan setelah peristiwa yang mengancam organisasi atau publiknya. Tujuannya bukan sekadar melindungi citra, tetapi mengurangi ketidakpastian, mencegah kerugian lanjutan, memenuhi kebutuhan informasi, dan memulihkan kepercayaan. Dalam pemerintahan, komunikasi krisis juga terkait dengan legitimasi, koordinasi antarlembaga, dan kewajiban pelayanan publik (Coombs, 2010; Nova, 2009).

Krisis dapat berasal dari dalam maupun luar organisasi. Walaupun pemerintah bukan pelaku suatu insiden, cara pejabat merespons dapat menciptakan krisis sekunder. Nada yang defensif, candaan, spekulasi, atau ketidakkonsistenan pesan dapat memperbesar kerusakan reputasi. Sebaliknya, empati, pembaruan faktual, kejelasan kewenangan, dan komitmen tindak lanjut membantu menjaga kepercayaan.

3.3. Government Public Relations

Hubungan masyarakat pemerintah menjembatani kebijakan, pelayanan publik, dan umpan balik warga. Fungsinya mencakup menjelaskan tindakan pemerintah, menerima masukan, mengoordinasikan informasi, dan menjaga akses publik terhadap fakta. Karena tidak berorientasi komersial, keberhasilannya terutama diukur dari kejelasan, akuntabilitas, keterbukaan, dan kepercayaan masyarakat (Suprawoto, 2018; Ruslan, 2016).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Kronologi dan Perubahan Arena Krisis

Kronologi yang dikonfirmasi organisasi keselamatan jurnalis menunjukkan bahwa paket dikirim pada 19 Maret dan dibuka pada 20 Maret 2025. Pelaku pada saat pencatatan belum diketahui. Insiden awalnya merupakan masalah keselamatan jurnalis dan penegakan hukum. Ketika pejabat komunikasi pemerintah memberikan tanggapan yang dinilai meremehkan, arena krisis meluas menjadi perdebatan tentang empati pemerintah, perlindungan pers, dan kualitas komunikasi publik.

Tabel 1: Evaluasi Respons Komunikasi Pemerintah

Kriteria	Bukti dalam dokumen	Evaluasi
Kecepatan	Tanggapan pejabat muncul setelah kasus menjadi perhatian publik.	Ada respons, tetapi tidak disertai peta tindak lanjut yang jelas.
Empati	Pernyataan bernada bercanda dan menilai korban tidak merasa terancam.	Tidak berpusat pada korban dan berisiko mengecilkan ancaman.
Konsistensi	Candaan dan permintaan tidak membesar-besarkan disertai jaminan kebebasan pers.	Pesan normatif dan nada komunikasi tidak koheren.
Tanggung jawab	Insiden disebut sebagai masalah Tempo dengan pihak lain.	Tanggung jawab protektif pemerintah tidak dijelaskan memadai.
Pemulihan	Tidak ada uraian terintegrasi mengenai pembaruan penyelidikan dan pemulihan kepercayaan.	Strategi pemulihan belum terlihat dalam corpus sumber.

Sumber: analisis dokumen dalam naskah sumber; bukan pengukuran opini publik.

Pernyataan yang dilaporkan media menyarankan agar kepala babi dimasak dan menafsirkan respons korban sebagai

tanda bahwa ia tidak merasa terancam. Pejabat juga menyatakan bahwa peristiwa itu merupakan masalah Tempo dengan pihak lain dan meminta agar tidak dibesar-besarkan, sambil menyampaikan jaminan kebebasan pers. Kombinasi candaan, penjarakan tanggung jawab, dan jaminan normatif menghasilkan pesan yang tidak koheren.

4.2. Empati dan Orientasi Korban

Empati seharusnya mendahului penilaian mengenai reaksi korban. Korban dapat menggunakan humor, ketenangan, atau pernyataan publik sebagai mekanisme menghadapi tekanan; hal itu tidak menghapus karakter ancaman. Respons pemerintah yang berpusat pada korban perlu mengakui risiko, mendukung keamanan jurnalis, menghindari menyalahkan atau mengecilkan pengalaman korban, dan memberi informasi mengenai saluran perlindungan.

4.3. Konsistensi dan Tanggung Jawab Institusional

Jaminan kebebasan pers kehilangan daya ketika disampaikan bersama kalimat yang meremehkan insiden. Dalam komunikasi krisis, konsistensi tidak berarti seluruh pejabat menggunakan kalimat yang sama, tetapi seluruh pesan harus bertumpu pada fakta dan prinsip yang sama. Pemerintah dapat menegaskan bahwa pelaku belum diketahui, mengancam intimidasi, menjelaskan kewenangan kepolisian, dan memastikan pembaruan informasi tanpa berspekulasi.

Tanggung jawab komunikasi berbeda dari pengakuan sebagai penyebab krisis. Pemerintah tidak perlu menerima kesalahan atas serangan yang pelakunya belum diketahui untuk tetap menjalankan tanggung jawab protektif. Ia dapat memfasilitasi koordinasi penegakan hukum, menyampaikan kepedulian, mendukung mekanisme keselamatan pers, dan menunjukkan bahwa ancaman terhadap kerja jurnalistik ditangani secara serius.

4.4. Reputasi Pemerintah dan Relasi Negara-Pers

Respons yang dipersepsikan tidak empatik dapat menimbulkan krisis reputasi karena publik menghubungkannya dengan sikap negara terhadap demokrasi dan media kritis. Namun, analisis perlu membedakan tiga lapis: fakta teror oleh pelaku tidak dikenal, isi pernyataan pejabat, dan interpretasi politik atas pernyataan itu. Naskah sumber tidak menyediakan bukti yang menghubungkan pemerintah dengan pengiriman paket; karena itu, artikel menolak mengubah persepsi atau kecurigaan menjadi tuduhan faktual.

Teori pers otoritarian membantu mengajukan pertanyaan mengenai toleransi terhadap intimidasi, kontrol, dan pembatasan kritik. Pada kasus ini, bukti yang tersedia lebih kuat untuk menilai kegagalan nada dan koordinasi komunikasi daripada menyimpulkan adanya kontrol pers yang sistematis. Penilaian mengenai kecenderungan otoritarian memerlukan data lebih luas tentang kebijakan, sensor, kekerasan, impunitas, intervensi redaksional, serta respons penegakan hukum dari waktu ke waktu.

4.5. Model Respons yang Direkomendasikan

Respons awal seharusnya mengakui insiden, menyatakan empati, menghindari spekulasi, dan menyebut langkah keamanan yang telah dilakukan. Tahap berikutnya memerlukan pusat informasi yang jelas, koordinasi dengan kepolisian dan Dewan Pers, pembaruan berbasis fakta, serta dukungan terhadap korban. Pada tahap pemulihan, pemerintah perlu melaporkan tindak lanjut penyelidikan, menilai protokol komunikasi pejabat, dan memperkuat mekanisme keselamatan pers.

5. Keterbatasan Penelitian

Kajian bergantung pada dokumen publik dan tidak mencakup wawancara dengan korban, Tempo, pejabat pemerintah, kepolisian, atau Dewan Pers. Corpus dan prosedur pengodean sumber tidak dilaporkan lengkap. Persepsi publik tidak diukur melalui survei atau analisis komentar yang sistematis. Oleh karena itu, temuan menjelaskan kualitas pesan yang terdokumentasi dan potensi implikasinya, bukan hubungan kausal, niat pejabat, identitas pelaku, atau keterlibatan pemerintah dalam tindakan teror.

6. Simpulan

Teror kepala babi terhadap redaksi Tempo merupakan ancaman terhadap keselamatan jurnalis dan ruang kerja pers. Respons komunikasi yang meremehkan ancaman mengalihkan fokus dari perlindungan korban menuju kontroversi mengenai sikap pemerintah. Kekurangan empati, inkonsistensi antara candaan dan jaminan kebebasan pers, serta ketiadaan pesan tindak lanjut yang kuat memperbesar risiko krisis reputasi.

Pemerintah perlu memisahkan ketidakpastian mengenai pelaku dari kewajiban melindungi jurnalis. Komunikasi yang kredibel menuntut empati, fakta, koordinasi, penjelasan kewenangan, dan transparansi tindak lanjut. Karena pelaku belum diketahui dan bukti keterlibatan pemerintah tidak tersedia, simpulan artikel terbatas pada evaluasi komunikasi publik. Penelitian lanjutan perlu menggunakan corpus yang terdokumentasi, wawancara multipihak, serta analisis longitudinal terhadap penanganan kasus dan relasi negara-pers.

7. Rekomendasi

Dalam 24 jam pertama, pemerintah perlu mengeluarkan pernyataan singkat yang mengakui insiden, menyampaikan empati kepada korban dan redaksi, mengancam intimidasi terhadap kerja jurnalistik, serta menjelaskan lembaga yang menangani

keamanan dan penyelidikan. Juru bicara harus menghindari candaan, penilaian atas reaksi korban, dugaan mengenai pelaku, dan klaim yang belum dapat diverifikasi.

Pada tahap koordinasi, satu pusat informasi perlu menyelaraskan pesan Kantor Komunikasi Kepresidenan, kepolisian, kementerian terkait, dan lembaga keselamatan pers. Pembaruan diberikan hanya ketika ada fakta baru, tetapi jeda informasi tetap dijelaskan agar tidak menimbulkan kesan pembiaran. Dukungan kepada korban mencakup asesmen keamanan, akses pelaporan, perlindungan data pribadi, dan komunikasi langsung yang tidak mengeksploitasi pengalaman korban.

Setelah fase akut, pemerintah perlu mengevaluasi protokol komunikasi pejabat, menerbitkan status tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mendukung mekanisme nasional keselamatan pers. Evaluasi independen sebaiknya menilai waktu respons, koherensi pesan, pemenuhan kebutuhan korban, koordinasi lintas lembaga, dan perubahan kepercayaan. Langkah tersebut memungkinkan pemulihan reputasi dibangun melalui tindakan yang dapat diperiksa, bukan melalui penegasan normatif semata.

Daftar Pustaka

- Aliansi Jurnalis Independen Jakarta & LBH Pers. 2025. Teror Kepala Babi ke Jurnalis Tempo: Serangan Berbahaya terhadap Kemerdekaan Pers. 20 Maret 2025.
- Arifin, Anwar. 2011. Komunikasi Politik: Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aziz, Muhammad Saiful. 2020. Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Covid-19. Masyarakat Indonesia, 46(2).
- Coombs, W. Timothy. 2010. Parameters for Crisis Communication. In W. Timothy Coombs & Sherry J. Holladay (Eds.), *The Handbook of Crisis Communication*. Chichester: Wiley-Blackwell.
- Dewan Pers. 2025. Dewan Pers Luncurkan Mekanisme Nasional Keselamatan Pers. Siaran Pers No. 11/SP/DP/VI/2025.
- Frandsen, Finn, & Winni Johansen. 2007. The Apology of a Sports Icon: Crisis Communication and Apologetic Ethics. *Hermes: Journal of Language and Communication Studies*, 38, 85-104.
- Khatami, Muhammad Iqbal. 2025. Teror Kepala Babi, Kebebasan Pers, dan Buruknya Komunikasi Pemerintah. Detik, 24 Maret 2025.
- McQuail, Denis. 2011. Teori Komunikasi Massa McQuail. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nova, Firsan. 2009. Crisis Public Relations: Bagaimana PR Menangani Krisis Perusahaan. Jakarta: Grasindo.
- Ruslan, Rosady. 2016. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siebert, Fred S., Theodore Peterson, & Wilbur Schramm. 1956. *Four Theories of the Press*. Urbana: University of Illinois Press.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta.
- Suprawoto. 2018. Government Public Relations: Perkembangan dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suyanto, Bagong, & Sutinah, eds. 2010. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana.

